

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI PERILAKU MEROKOK SAAT BERKENDARA DI JALAN

ABSTRAK

Perilaku merokok saat berkendara di jalan raya berpotensi mengancam keselamatan lalu lintas dan kesehatan pengguna jalan lain melalui paparan asap, abu, maupun bara rokok. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak atas kesehatan bagi korban perilaku merokok saat berkendara serta kebijakan hukum pidana dalam menangani perilaku merokok saat berkendara di Indonesia dan beberapa negara sebagai dasar reformulasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan bagi korban belum terlaksana secara optimal karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengatur secara eksplisit perilaku merokok saat berkendara. Meskipun Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 telah memuat larangan merokok ketika mengendarai sepeda motor, ruang lingkup ketentuan tersebut terbatas pada pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga belum memberikan pengaturan yang komprehensif bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta lemahnya perlindungan bagi pengguna jalan yang terdampak. Studi komparatif menunjukkan bahwa Inggris, Australia, dan Kanada telah menerapkan larangan yang lebih eksplisit dan spesifik dengan orientasi perlindungan kesehatan, khususnya terhadap anak sebagai kelompok rentan. Singapura menerapkan larangan pada kendaraan pelayanan publik dengan pembatasan tertentu terhadap kendaraan pribadi, sedangkan Thailand menggunakan pendekatan kawasan tanpa rokok tanpa secara khusus melarang merokok ketika mengemudikan kendaraan pribadi. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana Indonesia melalui perumusan larangan merokok saat berkendara secara eksplisit, penetapan unsur dan sanksi yang jelas serta proporsional, dan penguatan orientasi perlindungan hak atas kesehatan pengguna jalan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Merokok Saat Berkendara, Hak atas Kesehatan.

COMPARATIVE CRIMINAL LAW IN ADDRESSING SMOKING WHILE DRIVING ON PUBLIC ROADS

ABSTRACT

Smoking while driving on public roads has the potential to endanger traffic safety and the health of other road users through exposure to cigarette smoke, ash, and burning embers. This study aims to analyze the fulfillment of the right to health for victims affected by smoking while driving, as well as the criminal law policies addressing such conduct in Indonesia and several other countries as a basis for legal reformulation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the fulfillment of the right to health for affected victims has not been optimally realized because Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation does not explicitly regulate smoking while driving. Although Article 6 letter c of Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 prohibits smoking while operating a motorcycle, the scope of this provision is limited to motorcycle drivers providing services for public purposes and therefore does not comprehensively regulate all motor vehicle drivers. This regulatory limitation creates legal uncertainty and weakens legal protection for affected road users. The comparative study demonstrates that the United Kingdom, Australia, and Canada have adopted more explicit and specific prohibitions with a strong health-protection orientation, particularly concerning children as a vulnerable group. Singapore imposes smoking restrictions on public service vehicles while applying certain limitations to private vehicles, whereas Thailand adopts a smoke-free area approach without specifically prohibiting smoking while driving private vehicles. These comparative findings demonstrate the need to reformulate Indonesia's criminal law policy by expressly prohibiting smoking while driving, establishing clear and proportionate legal elements and sanctions, and strengthening the protection of road users' right to health.

Keywords: *Criminal Law Policy, Smoking While Driving, Right to Health.*